

**KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Oleh

**Ahmad Mustanir¹⁾, Madaling²⁾,
Andi Uceng³⁾, M.Nurzin R. Kasau⁴⁾, Barisan⁵⁾ Dewi
Andriani⁶⁾**

1) 2) 3) 4) 5) Dosen Universitas Muhammadiyah Rappang

6) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Rappang

E-mail: ahmadmustanir74@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang paling mempengaruhi karakteristik kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Karakteristik kepemimpinan Lurah kurang dipahami oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kurang aktif. Populasi adalah seluruh Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu berjumlah 329 Jiwa. Sampel ditentukan dengan menggunakan purposive sampling berjumlah 33 responden, teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Study Kepustakaan dan Kuesioner. Teknik analisis data menggunakan tabel frekuensi dan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan lurah gaya demokratis 79,2%, gaya birokratis 83,6%, gaya kebebasan 58,6% gaya otokratis 62,4% dengan capaian 71% kategori baik. Indikator partisipasinya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan 50,2% partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 75% partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 64,8%, partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan 67,8% dengan capaian 64,45% kategori baik. Adapun faktor yang paling mempengaruhi karakteristik kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yaitu faktor genetis 67,2%, faktor sosial 79,2%, faktor bakat 75,6% dengan capaian 74% kategori baik.

Kata Kunci : Karakteristik Kepemimpinan, Musrenbang, Partisipasi Masyarakat

Abstract

The purpose of this study was to determine the characteristics of lurah leadership on community participation as well as what factors most influence the characteristics of lurah leadership on community participation in the Village Development Planning Consultation in Duampanua, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. The leadership characteristics of the Head of the Lurah are less understood by the community so that community participation in development planning meetings is less active. This study aims to determine the Characteristics of the Leadership of the Head of the Village Against Community Participation in the Development Planning Meeting in Duampanua Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency, and aims to examine the theory of Inu Kencana and Yadav regarding the Characteristics of Leadership and community participation. The study was conducted in Duampanua Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency, while the type of this research was quantitative, the population in this study was the Head of the Family in the Duampanua Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency, amounting to 329 people, while the sample was determined using purposive sampling totaling 33 respondents, as for data collection techniques, namely Obsevasi, Literature Study and Questionnaire, while data analysis techniques use Frequency tables and Likert scales. The results of this study indicate that the characteristics of democratic style village leadership 79.2%, 83.6% bureaucratic style, 58.6% freedom style, 62.4% autocratic style with 70.95% achievement rounded up to 71% good category. Indicators of participation were participation in decision making 50.2%, participation in activity implementation 75%, participation in development monitoring and evaluation 64.8%, participation in development utilization 67.8% with achievements 64.45% rounded up to 64% good category. The factors that most influence the characteristics of lurah leadership to community participation in development planning deliberations are genetic factors 67.2%, social factors 79.2%, talent factors 75.6% with 74% achievement good category.

Keywords: Characteristics of Leadership, Community Participation, Musrenbang

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi orang lain atau bawahan agar mau melakukan apa yang diperintahnya. Hal ini penting karena bagaimanapun seorang pemimpin mempunyai peran sebagai figur yang dapat dijadikan contoh oleh para bawahannya. Selain itu, Pemimpin juga disebut-sebut sebagai leader yang berfungsi melakukan hubungan interpersonal dengan bawahannya dengan cara memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan para bawahannya supaya bekerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dessler (2002:27) mengatakan bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi

dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya (owner).

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang di berikan merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Program Pembangunan di tingkat kelurahan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah dan makmur oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelurahan.

Partisipasi dapat berjalan lancar bila masyarakat memberikan kontribusi dalam proses kegiatan. Melalui berbagai macam bentuk partisipasi inilah masyarakat bisa ikut terlibat dan dapat bertanggung jawab atas program yang di berikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan masih kurang baik yang ditunjukkan dengan adanya masalah-masalah klasik yang sering terjadi di dalam masyarakat dengan tidak aktifnya anggota masyarakat mengikuti setiap acara rapat dan kegiatan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan tidak mampu merangkul masyarakat ikut dalam acara-acara yang tersebut diatas. Dalam proses identifikasi

kebutuhan hingga penetapan program, prinsip-prinsip dasar dalam PRA seperti : saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua orang, penerapan konsep triangulasi dan keberlanjutan program cenderung diabaikan. Program yang ditetapkan lebih banyak berasal dari masukan tokoh masyarakat yang hadir dengan hanya berdasar pertimbangan subjektif tanpa pernah melakukan triangulasi kelapangan (*recheck*). Pelibatan masyarakat sangat minim yaitu hanya mereka yang hadir di pertemuan tingkat kelurahan. Hanya tokoh masyarakat tertentu yang diundang serta aparat tertentu di kelurahan. Proses saling belajar dan berbagi pengalaman sangat minim karena program-program yang diajukan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan tidak di musyawarahkan lebih mendalam berdasarkan kajian-kajian di setiap bidangnya.

Bila kondisi suatu pemimpin sejalan dengan masyarakat maka dengan sukarela masyarakat akan ikut berperan aktif terhadap musyawarah perencanaan pembangunan, akan tetapi karakteristik kepemimpinan yang menjadi pertimbangan masyarakat karena kehadirannya yang tidak menentu dan seringnya memberi perintah kepada bawahan sebagai perwakilan dirinya didalam forum dan inilah yang sangat mempengaruhi masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Karakteristik kepemimpinan lurah kurang di pahami oleh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kurang aktif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan

Gaya dalam Bahasa Inggris disebut dengan *style* Berarti corak atau mode seseorang yang tidak banyak berubah dalam mengajarkan sesuatu. Hal ini karena gaya merupakan kesanggupan,

kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, lagu, metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu. Dengan demikian, yang bersangkutan mendapat penghargaan untuk keberhasilannya dan kejatuhan nama bila mengalami kegagalan. Berikut ini beberapa gaya kepemimpinan yang bisa dikaji dalam Islam, antara lain sebagai berikut :

1) Gaya demokratis

Gaya demokratis dalam Islam adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan. Begitu juga antar bawahan di bagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antarbawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya. Oleh karena itu mesti dibuat ketentuan tertentu dalam pendemokrasian ini karena kekuasaan berada di tangan bawahan (Mustanir, Justira, et al. 2018) (Mustanir and Jaya 2016).

2) Gaya birokratis

Gaya birokratis dalam kepemimpinan Islam adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu. Artinya, setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*) sehingga bawahan menjadi kaku tetapi (*Zakelijk*) Rasulullah Muhammad mengatakan: "Andaikata anakku sendiri mencuri akan kupotong tangannya". Pakar yang banyak berceles tentang kepemimpinan yang birokrasi ini adalah Max Weber (Inu Kencana, 112:2014) (Irwan et al. 2019).

3) Gaya kebebasan

Gaya kebebasan adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan

memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya. Metode ini dikenal juga dengan *Laissez Faire* atau *liberalism*. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi, pimpinan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Untuk itu teori ini memerlukan bakat tersendiri dari pemimpin yang melakukannya. Di Indonesia, hal ini sangat terdukung karena masyarakat Indonesia dari suku apapun selalu mendahulukan pemimpin pemerintahan karena paternalistik yang dianutnya, walaupun pemimpin pemerintahan hanya menyampaikan perintah belum sindiran sering bawahan sudah menangkap maksudnya (Damis Dadda et al. 2019).

4) Gaya otokratis

Gaya otokratis cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (*coercive power*). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Akan tetapi, sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2018) (Juhannis, n.d.) (Juhannis et al., n.d.).

Suwatno (2001:161) (Latif et al. 2019), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

1) Faktor genetis

Adalah faktor yang menampilkan pandangan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena latar belakang keturunannya.

2) Faktor social

Faktor ini pada hakikatnya semua orang sama dan bisa menjadi pemimpin. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang pemimpin, dan tersalur sesuai lingkungannya.

3) Faktor bakat

Faktor yang berpandangan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik, apabila orang itu memang dari sejak kecil sudah membawa bakat kepemimpinan (Inu Kencana, 112-115:2014).

2.2 Konsep dan Teori Partisipasi

1) Pengertian partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Bornby dalam (Uceng, Erfina, et al. 2019) (Uceng, Ali, et al. 2019) (Sapri et al. 2019), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, dalam (Mustanir, Yasin, et al. 2018) (Mustanir and Yasin 2018)). Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson dalam (Mustanir, Sellang, et al. 2018) (Mustanir and Rusdi. Muhammad 2019) (Mustanir and Razak 2017) (Mustanir and Lubis 2017)).

2) Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pengertian tentang “partisipasi” yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada

dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. (Yadav dalam (Mustanir and Jusman 2016) (Mustanir, Dema, et al. 2018) (Mustanir and Darmiah 2016)) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang

umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara profesional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup

masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat Sasarannya. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

3) Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat, (Indrati, Maria, 2006), (Rakhmat, 2009) mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”. Dari pengertian di atas menurut Isbandi dalam (Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid 2017) (Mustanir, Ali, and Yasin 2018) (Mustanir, Abadi,

and Nasri 2016) (Mustanir, Ahmad; Abadi 2016) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Anderson, JE., 1990, Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat.

Slamet (2002:13), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) antara lain adalah faktor sosial budaya yang mencakup: norma, nilai kepercayaan, dan sikap. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut. Sehingga prinsip-prinsip partisipasi harus memperhatikan kebersamaan, tumbuh dari bawah (bottom up) dan kepercayaan dan keterbukaan.

2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah rencana pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun

anggaran berikutnya Wahab, (2006). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Kelurahan, yang dimaksud Perencanaan pembangunan kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kelurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kelurahan (Rondinelli, A Dennis, dalam Widodo, (2011) (Mustanir 2016b) (Mustanir 2018b) (Mustanir 2017b) (Mustanir 2018a).

Musyawah rencana pembangunan menurut (Rondinelli, A Dennis, dalam Widodo, (2011) (Mustanir 2017a) (Mustanir, n.d.) (Mustanir 2016a) (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2018) (Juhannis 2016)) merupakan Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut: 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan. 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya

masyarakat sendiri. 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Imron, Ali. 2008). Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian ini memiliki dua variabel, variabel pertama disebut sebagai variabel bebas yaitu Karakteristik Kepemimpinan dan variabel kedua sebagai variabel terikatnya yaitu Partisipasi Masyarakat. Jenis penelitian yang ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif jadi setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 329 Kepala Keluarga dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Duampanua. (Kantor Kelurahan Duampanua, 2017). Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling purposive adalah teknik penentuan sampel yang proporsional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Observasi, Study Kepustakaan (Library Research) dan Kuesioner. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi dan persentase berdasarkan hasil skala likert dengan Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 4 hingga terendah skor 1 (Sugiyono 2003:107)

4. PEMBAHASAN

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Karakteristik Kepemimpinan Lurah

| No | Tanggapan Responden | Kategori | Rata-Rata Persentase |
|------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Gaya Demokratis | Baik | 79,2% |
| 2 | Gaya Birokratis | Sangat Baik | 83,6% |
| 3 | Gaya Kebebasan | Cukup Baik | 58,6% |
| 4 | Gaya Otokrasi | Baik | 62,4% |
| Jumlah rata-rata | | Baik | 70,95% |

Sumber : Hasil rekapitulasi olahan kuesioner, Agustus 2018

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada gaya kepemimpinan diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 70,95% dibulatkan menjadi 71%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel adalah sebesar 469. Untuk mengetahui jumlah persentase, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus Nasir, 2011:53.

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot berpengaruh} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\
 &= \frac{469}{5 \times 4 \times 33} \\
 &= \frac{469}{660} \\
 &= 0,71 \times 100\% \\
 &= 71\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari Karakteristik Kepemimpinan Lurah di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 71%.

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat

| No | Tanggapan Responden | Kategori | Rata-Rata Persentase |
|------------------|---|------------|----------------------|
| 1 | Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan | Cukup Baik | 50,2% |
| 2 | Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan | Baik | 75% |
| 3 | Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan | Baik | 64,8% |
| 4 | Partisipasi dalam Pemanfaatan Pembangunan | Baik | 67,8% |
| Jumlah rata-rata | | Baik | 64,45% |

Sumber : Hasil rekapitulasi olahan kuesioner, Agustus 2018

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada Partisipasi Masyarakat diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 64.45%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel adalah sebesar 426. Untuk mengetahui jumlah persentase, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus Nasir, 2011:53.

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot berpengaruh} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\
 &= \frac{426}{5 \times 4 \times 33} \\
 &= \frac{426}{660} \\
 &= 0,64 \times 100\% \\
 &= 64\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 23% dari 100% hasil yang diharapkan.

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinan Lurah

| No | Tanggapan Responden | Kategori | Rata-Rata Persentase |
|------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 1 | Faktor Genetis | Baik | 67,2% |
| 2 | Faktor Sosial | Baik | 79,2% |
| 3 | Faktor Bakat | Baik | 75,6% |
| Jumlah rata-rata | | Baik | 74,00% |

Sumber : Hasil rekapitulasi olahan kuesioner, Agustus 2018

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 3 item pertanyaan pada Faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan Lurah diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 74,00%, Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori “baik”.

Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel adalah sebesar 367. Untuk mengetahui jumlah persentase, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus Nasir, 2011:53.

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot berpengaruh} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\
 &= \frac{367}{5 \times 3 \times 33} \\
 &= \frac{367}{495} \\
 &= 0,74 \times 100\% \\
 &= 74\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari pengaruh kepemimpinan Lurah Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 74% dari 100% hasil yang diharapkan.

5. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan pada bab terdahulu maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Karakteristik kepemimpinan lurah gaya demokratis 79,2%, gaya birokratis 83,6%, gaya kebebasan 58,6%, gaya otokratis 62,4% dengan capaian 70,95% dibulatkan menjadi 71% kategori baik. Indikator partisipasinya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan 50,2%, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 75%, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 64,8%, partisipasi dalam pemanfaatan pembangunan 67,8% dengan capaian 64,45% bulatkan menjadi 64% kategori baik.
- 2) Faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi karakteristik kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yakni faktor genetis 67,2%, faktor sosial 79,2%, faktor bakat 75,6% dengan capaian 74% kategori baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1986. *Pemikiran dan Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Anderson, JE., 1990 *Public Policy Making Hoolt*. Rinehart and Weston, New York.

A.Sitohang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Awang, C.L, 2010, *Studi Kebijakan Partisipatif Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Pasca Pembentukan Kabupaten Wakatobi*, Tesis: Universitas Gadjah Mada.

Budiardjo, Miriam. 1984. *Simposium Kapitalisme Sosialisme Demokrasi*. Penerbit: Gramedia Jakarta.

Basah, Sjachran. 1992. *Ilmu Negara*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Damis Dadda, Andi, Ahmad Mustanir, Andi Nilwana, and Jamaluddin Ahmad. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Lurah Perempuan Terhadap Stabilitas Kamtibmas Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 378–83. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.

Gie, The Liang. 1973. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Karya.

Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta. Jakarta: Pustaka Antara.

Heroepoetri, Rindi, Ahmad Santoso 2003 “Peran Serta Masyarakat dalam Lingkungan, Walhi Jakarta.

Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Indrati, Maria, 2006. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar Pembentukannya. Kanisius. Yogyakarta.

Isjwara, F.1967. *Pengantar Ilmu Politik. Bandung*: Penerbit Dhiwantara.

Irwan, Irwan, Adam Latif, Sofyan Sofyan, Ahmad Mustanir, and Fatimah Fatimah. 2019. “Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 32–43. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900>.

Juhannis, Hamdan. n.d. “Information to Users 8811 &.”

———. 2016. “RESEARCH REPORT OF PENELITIAN MANDIRI PROFESSIONAL TECHNOLOGY AND THE SOCIAL BEHAVIOR OF STUDENTS (THE EFFECTS OF SMARTPHONE USAGE IN MADRASAH ALIYAH MADANI GOWA) By : TARBIYAH AND TEACHING SCIENCE FACULTY FUNDED BY : DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (.”

Juhannis, Hamdan, Researcher Prof, Hamdan Juhannis, and D Ph. n.d. “The Work Ethics of Salafists Economic Activities in Makassar (A Sociological Perspective),” no. 1: 1–20.

Kansil, CST. 1992 *Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Latif, Adam, Irwan Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 1–15.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.

Maarif, Syafii.1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Mustanir, Ahmad; Abadi, Partisan. 2016. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Politik Profetik* 5 (2): 247–61.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.

Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, Hariyanti. 2017. "Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning." In *Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*, edited by Philipus Keban Nanang Haryono, Agie Nugroho Soegiono, Putu Aditya Ferdy Ariawantara, 77–84.

Surabaya: The Faculty Of Social And Political Science
Universitas Airlangga.
<http://conference.unair.ac.id/index.php/IAPA/iapa2017>.

Mustanir, Ahmad. n.d. "Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan."
[https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberda
yaan_Masyarakat_Kewirausahaan](https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan).

———. 2016a. "Magang Mahasiswa." Rappang.
[https://www.academia.edu/38492683/Panduan_magang_STISIP
_Muhammadiyah_Rappang_2015_2016.pdf](https://www.academia.edu/38492683/Panduan_magang_STISIP_Muhammadiyah_Rappang_2015_2016.pdf).

———. 2016b. "Perencanaan Mewujudkan Kehidupan Pemerintahan
Dan Sosial Yang Islami Di Desa Tonrong Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang." In *Seminar Nasional, Reformasi Dan
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan*, edited by Budiman, Rita
Kalalinggi, Burhanudin, and Jauchar B, 289–307. Samarinda:
FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN.
[https://www.researchgate.net/publication/330101808_Perencana
an_Mewujudkan_Kehidupan_Pemerintahan_dan_Sosial_Yang_I
slami_di_Desa_Tonrong_Rijang_Kabupaten_Sidenreng_Rappa
ng](https://www.researchgate.net/publication/330101808_Perencanaan_Mewujudkan_Kehidupan_Pemerintahan_dan_Sosial_Yang_Islami_di_Desa_Tonrong_Rijang_Kabupaten_Sidenreng_Rappang).

———. 2017a. "Deskripsi Tentang Keamanan Di Gedung Dan
Jalanan Kota Kuala Lumpur." Kuala Lumpur.
[https://www.researchgate.net/publication/331064740_Deskripsi_
Tentang_Keamanan_Di_Gedung_dan_Jalanan_Kota_Kuala_Lu
mpur](https://www.researchgate.net/publication/331064740_Deskripsi_Tentang_Keamanan_Di_Gedung_dan_Jalanan_Kota_Kuala_Lumpur).

———. 2017b. "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui
Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif."

Rappang.

https://www.researchgate.net/publication/331065123_Pemberdayaan_Badan_Usaha_Milik_Desa_Melalui_Kelompok_Ekonomi_Kewirausahaan_Secara_Partisipatif.

———. 2018a. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Dan Potensi Desa Sereang.” Rappang.

https://www.researchgate.net/publication/331064206_Pemanfaatan_Teknologi_Informasi_Dalam_Optimalisasi_Pelayanan_Publik_dan_Potensi_Desa_Sereang.

———. 2018b. “Pemberdayaan Perempuan Anggota Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemanfaatan Lahan Kebun Bibit Desa.” Rappang.

https://www.researchgate.net/publication/331071158_Pemberdayaan_Perempuan_Anggota_Badan_Usaha_Milik_Desa_dengan_Pemanfaatan_Lahan_Kebun_Bibit_Desa.

Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and A Nasri. 2016. “Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan.” In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*, 84:356 – 359. Makassar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconег-16.2017.79>.

Mustanir, Ahmad, Akhwan Ali, and Akhmad Yasin. 2018. “Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency.” In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Maka.

Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2016. “IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Politik Profetik* 4 (2): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.

Mustanir, Ahmad, Herman Dema, Haeruddin Syarifuddin, Kiki Meity, and Sri Wulandari. 2018. “Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (1): 27–39. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/212>.

Mustanir, Ahmad, and Irfan Jaya. 2016. “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH TOWANI TOLOTANG DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Politik Profetik* 04 (1): 84–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#>.

Mustanir, Ahmad, and Jusman. 2016. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DI PASAR LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Ilmiah Akmen* 13 (3): 542–58. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69>.

Mustanir, Ahmad, Nur Justira, Kamaruddin Sellang, and Andi Ilham Muchtar. 2018. “Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning.” *International*

Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLASS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement, 110 – 115.

[https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-](https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning)

[Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning](https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning).

Mustanir, Ahmad, and Sandi Lubis. 2017. "Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning." In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)*, 163:316–19. Pekanbaru: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.

Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat Razak. 2017. "Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 1–7. Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://asosiasipascapptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6>.

Mustanir, Ahmad, and Rusdi. Muhammad. 2019. "Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 378–83. Medan: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.

Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. "PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TONRONGGE KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (1): 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.

Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. 2018. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2): 137–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.

Mustanir, Ahmad, Akhmad Yasin, Irwan Irwan, and Muhammad Rusdi. 2018. "Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (4): 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1775>.

Nasroen, M. 1986. *Asal Mula Negara*. Jakarta: Aksara Baru.

Nazir, Muhammad 2005 "Analisis dan Desain Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar" Penerbit Andi Jakarta.

Nasution, A.H. 1977. *Memenuhi Panggilan Tugas 1 s/d VII*. Jakarta:
Penerbit: Gunug.

Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:
Penerbit Bina Aksara.

Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka
Arif. Jakarta.

Rondinelli, A Dennis, 1983. *Decentralization and Development*. Sage
Publication. California.

Sapri, Sapri, Ahmad Mustanir, Monalisa Ibrahim, Andi Astinah
Adnan, and Wirfandi Wirfandi. 2019. "Peranan Camat Dan
Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang."
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5 (2): 33–48.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>.

Soetono, 1993. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.

Soehino, 2002. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Suwatno 2003 "Manajemen Sumber Daya Manusia". Erlangga
Jakarta.

Syafii, Inu Kencana. 1991. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:
Penerbit Eresco dan Refika Aditama.

Syafii, Inu Kencana, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Thohah, Miftah. 1994. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, and Nirmawati Nirmawati. 2019. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal MODERAT* 5 (2): 1–17.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2125>.

Uceng, Andi, Erfina Erfina, Ahmad Mustanir, and Sukri Sukri. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5 (2): 18–32.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>.

Wahab, Abdul dkk. 2006. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.

Widodo, Joko 2011 . *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia. Surabaya.

Winardi, 1990. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Mandar Maju